

Nama : Wayan Sintia Dewi
 NPM : 2213031083
 Kelas : 2022 C
 Matrikul : UAS Akutansi Perpajakan

1. Diketahui :

- Tuan caknan melakukan jasa perawatan mesin pemotong rumput kepada PT Ambargaya dengan imbalan yang diterima : Rp. 28.000.000
- Upah yang dibayarkan kepada pekerja : Rp. 11.250.000
- Biaya sparepart : Rp. 5.550.000

Ditanya:

Berapakah Pph pasal 21 yang terutang?

Jawab:

Untuk menghitung Pph pasal 21 yang terutang, maka perlu menentukan penghasilan neto yang diterima oleh tuan caknan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan

Penghasilan Bruto (pendapatan kotor):

Penghasilan bruto = Rp. 28.000.000

Biaya yang dapat dikurangkan:

Upah pekerja = Rp. 11.250.000

Biaya sparepart = Rp. 5.550.000

Total biaya = Rp. 11.250.000 + Rp. 5.550.000 = Rp. 16.800.000

Penghasilan neto (penghasilan kena pajak):

Penghasilan neto = penghasilan Bruto - Total biaya

penghasilan neto = Rp. 28.000.000 - Rp. 16.800.000
 = Rp. 11.200.000

Tarif pph pasal 21: Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, tarif Pph pasal 21 untuk penghasilan tidak tetap (Freelancer) adalah sebagai berikut:

Jika penghasilan neto tahunan kurang dari Rp. 50.000.000 : 5%.

Karena penghasilan neto yang dihitung adalah Rp. 11.200.000 maka tarif yang berlaku adalah 5%.

No. _____

Date : _____

PPh pasal 21 yang kentang:

PPh pasal yang kentang = $5\% \times \text{penghasilan neto}$

PPh pasal 21 yang kentang = $5\% \times \text{Rp. } 11.200.000 = \text{Rp. } 560.000$

Jadi PPh pasal 21 yang kentang oleh Ivan calenan atas jasa perawatan mesin pemotong rumput kepada PT Ambargaya adalah Rp. 560.000

2. Diketahui :

Bendahara pengeluaran dinas pertanian kabupaten A pada Juli 2016 melakukan pembayaran atas pembelian mat tulis kantor dari toko kuring, senilai Rp. 2.100.000 (termasuk PPh 10%). Pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan.

Ditanya:

Hitunglah PPh pasal 22?

Jawab:

Nilai pembelian barang termasuk PPh $\text{Rp. } 2.100.000$

PPh $(100/110) \times \text{Rp. } 2.100.000$ $\text{Rp. } 1.909.091$

Pembayaran tersebut tidak dikenakan PPh pasal 22 karena nilainya kurang dari Rp. 2.000.000

Menurut PMK-59/PMK.03/2022 :

Batasan Nilai Belanja tidak dipungut PPh pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara pemerintah (selain bendahara BOS) adalah PPh pasal 22 tidak dipungut oleh Bendahara atau instansi pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPh dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

3. untuk menemukan angsuran Pph 25 yang harus dibayarkan oleh PT Cundasan, kita perlu mengetahui beberapa hal penting:

- Estimasi penghasilan kena pajak (PKP)
- Tarif pajak penghasilan (Pph) Badan
- Penghasilan Neto perbulan

Asumsi: PT Cundasan hanya memiliki omset tanpa pengurang lainnya, yang berarti omset dianggap sama dengan penghasilan bruto.

langkah perhitungan:

estimasi penghasilan kena pajak (PKP)

Anggap saja PT Cundasan memiliki laba bersih setelah biaya-biaya (dalam hal ini kita asumsikan biaya tidak disebutkan, sehingga kita pakai penghasilan kotor sebagai dasar sementara)

Penghasilan neto tahunan

Jika penghasilan bruto adalah 7,5 milyar, maka penghasilan bruto ini bisa kita gunakan langsung

Tarif pajak penghasilan badan:

Berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia, tarif Pph Badan adalah 22%.

Pph perhitungan tahunan

- Pph tentang = Penghasilan neto $\times$ tarif pajak
- Pph tentang = Rp. 7.500.000.000 $\times$ 22% = 1.650.000.000

Angsuran pph 25 perbulan

- Pph 25 perbulan = Pph tentang / 12
- Pph²⁵ perbulan = Rp. 1.650.000.000 / 12 = Rp. 137.500.000

Jadi ~~Anggapa~~ angsuran pph 25 yang harus dibayarkan oleh PT Cundasan setiap bulan adalah Rp. 137.500.000